DAFTAR PUSTAKA

Buku atau Literatur

Adjie, Habib. 2008.*Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Ahmadi,Wiratni. 2006.*Sinkronasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan Di Indonesia.*Bandung: PT. Refika Aditama.

Arikanti Natakusumah, Muhani Salim, dan Warda Sungkar Alurmei, 1987.*Pengoperan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Menurut UUPA.* Jakarta : Media Notariat No. 4 Tahun II.

Azwar,Saifuddin. 1997.*Metode Penelitian.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Badrulzaman,Mariam Darus. 1983.*KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan.* Bandung: Alumni.

Budiono,Herlien. 2007.*Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chandra,S. 2005.*Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah.* Jakarta: PT. Gramedia.

Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, 1985.*Tata Laksana Pengurusan Hak Atas Tanah.*Jakarta: Yayasan Hudaya Bina Sejahtera.

Harsono,Boedi. 1987.*Perkembangan Hukum Tanah Adat.*Jakarta: Djambatan.

————————. 2008.*Hukum Agraria Indonesia.*Cetakan Keduabelas.Jakarta: Djambatan.

HS, H.Salim, dkk. 2007.*Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU).* Jakarta: Sinar Grafika.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 2009.*Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Jehani,Libertus. 2008.*Pedoman Praktis Membuat Surat Perjanjian.* Jakarta: Visimedia.

Kie,Tan Thong. 2000.*Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris.* Buku I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Komariah. 2008.*Hukum Perdata.* Malang: UMM Press.

Meliala,Djaja S. 2008.*Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Bandung: Nuansa Aulia.

Miru,Ahmadi. 2007.*Hukum Kontrak Perancangan Kontrak.* Jakarta: Raja GrafindoPersada.

Notodisoerjo,Soegondo. 1982.*Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan.* Jakarta: CV. Rajawali.

Patrik,Purwahid. 1994.*Dasar-dasar Hukum Perikatan.*Bandung: Mandar Maju.

Perangin-angin,Effendy 1986.*Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

——————— . 1990.*Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*.Jakarta: CV. Rajawali.

Rubaei,Achmad. 2007.*Hukum Pengadaan Tanah (untuk kepentingan umum.*, Malang: Bayumedia.

Satrio,J. 1992.*Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya).*Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Shofa, Burhan Ash. 2004.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Rineka Cipta.

Sjahdeini,Sutan Remy. 1993.*Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Soedjendro, Kartini. 2001.*Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang berpotensi Konflik*.Yogjakarta : Kanisius

Soekanto,Soerjono. 1986.*Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998.*Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*.Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti,R.. 1998.*Hukum Perjanjian.* Jakarta: Intermasa.

Sutedi,Adrian. 2011.*Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tengker, Freddy. 2012.*Buku Tentang Perikatan Dalam Teori Dan Yurisprudensi*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Tirtaamidjaja,MR. 1970.*Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. Jakarta: Djambatan.

Tobing,G.H.S Lumban. 1983.*Peraturan Jabatan Notaris.* Jakarta: Erlangga.

Waluyo,Bambang. 2008.*Penelitian Hukum dalam Praktek*.Jakarta: Sinar Grafika.

Wicaksono. 2009.*Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*. Jakarta: Visimedia.

Widjaja,Gunawan. 2004.*Aspek Hukum Dalam Bisnis (Pemilikan, Perwakilan, & Pemberian Kuasa Dalam Sudut Pandang KUHPerdata).* Jakarta: Prenada Media.

.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H.Perdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

Website

Badan Pertanahan Nasional, *Jual Beli*, *http://site.bpn.go.id/o/Beranda/Layanan-Pertanahan*, diakses pada 20 Juni 2016.